

Judul : Kebijakan tidak wajib skripsi sisakan pro dan kontra
Tanggal : Jumat, 01 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

Kebijakan tidak Wajib Skripsi Sisakan Pro dan Kontra

PERATURAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi masih memicu pro dan kontra di sejumlah kalangan. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) agar membuat aturan yang jelas dan baku perihal ketidakwajiban skripsi dan penerbitan tesis serta disertasi sebagai syarat kelulusan.

Ia menilai kebijakan tersebut akan menimbulkan polemik dalam implementasinya. "Jangan

dilepas kebijakan kampus masing-masing. Nanti malah tidak jelas siapa yang bisa berubah (untuk tidak lagi menggunakan skripsi sebagai syarat lulus) dan mana yang belum bisa," tutur Dede, kemarin. Pasal 18, 19, dan 20 peraturan tersebut menyatakan mahasiswa sarjana ataupun sarjana terapan dapat diberi tugas akhir dalam bentuk selain skripsi, seperti prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik secara individu maupun kelompok.

"Project base atau kegiatan sosial pun harus *in line* dengan program studi ilmu yang diam-

bil. Jangan yang sama sekali tidak ada hubungannya. Intinya, setiap perubahan harus disikapi dengan berhati-hati," tandasnya.

Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syamsul Gultom, yang menilai tugas skripsi jauh lebih memberi manfaat dalam melatih mahasiswa menerapkan metode dan berpikir ilmiah. Pasalnya, ketika menyusun skripsi, mahasiswa dilatih untuk merumuskan masalah, mencari jawaban teoretis, merumuskan hipotesis, mengumpulkan lalu mengolah data, menguji hipotesis, dan membuat simpulan. "Bagi ma-

hasiswa Unimed, mengerjakan skripsi bukan hal yang sulit karena sudah terlatih sejak awal," ujarnya.

Secara terpisah, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih mengatakan sejak 2022 kampusnya telah menerapkan kebijakan lulus kuliah tanpa skripsi. Namun, kata dia, pembuatan skripsi tetap menjadi pilihan paling mudah bagi para mahasiswa ketimbang tugas proyek.

Universitas Sumatra Utara (USU) mengaku bakal menyesuaikan aturan baru terkait dengan penerbitan permendikbud-ristek tersebut. "Kan, enggak mungkin kita buat peraturan rektor bertentangan dengan peraturan menteri," ujar Wakil Rektor 1 USU Edy Ikhshan. (Ant/Dls/H-3)